

# Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Lancong

Sri Devfa<sup>1</sup>, Nellis Mardhiah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Teuku Umar, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 13 Januari 2022

Accepted 22 Mei 2022

Available online 01 Juni 2022

### Kata Kunci:

Kebijakan Publik;  
Pemberdayaan;  
Kesejahteraan Masyarakat

### Keywords:

Public Policy;  
Empowerment; Public  
Welfare

## ABSTRAK

Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan merupakan program yang bergerak untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pendidikan generasi pemuda di Gampong Lancong. Dalam pelaksanaan program ini diperlukan partisipasi dari masyarakat Lancong agar program ini terlaksana dengan baik, sementara untuk masyarakat lancong sendiri sangat mini m dengan dunia literasi bahkan rendahnya tingkat pendidikan karena Desa Lancong merupakan desa terpencil yang ada di Aceh Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan dari program PKK bidang pemberdayaan pendidikan di Desa Lancong, Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *case study*, teknik pengumpulan data dengan purposive sampling dengan jumlah responden enam orang dan tahapan penelitian melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi. Hasil penelitian program PKK menunjukkan bahwa implementasi sudah tercapai akan tetapi belum terlaksana secara maksimal dimana sosialisasi belum dilaksanakan bagi masyarakat Lancong dalam bidang pemberdayaan pendidikan. Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pendidikan masih minim, masyarakat lancong lebih memilih untuk bekerja di usia muda dan tidak ingin melakukan pendidikan karena menurut mereka pendidikan belum menjamin kehidupan masyarakat sementara bekerja sebagai petani dan penggali emas sudah pasti menjamin kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum berjalan secara efektif dan efisien.

## ABSTRACT

The PKK Program for Educational Empowerment is a program that aims to improve the community's well-being by enhancing the education of Gampong Lancong's youth. Because Lancong Village is a rural village in West Aceh, the Lancong community must participate in order for the program to be implemented correctly, despite the fact that the Lancong community has very low literacy and even low levels of education. The goal of this study is to examine and learn about the PKK program's educational empowerment policies in Lancong Village, Sungai Mas District, West Aceh Regency. With a case study methodology, data collection techniques employing purposive sampling with a total of six respondents, and research phases through interviews, observation, and documentation, the research method employed is qualitative. The research findings based on these four factors were obtained, but not effectively applied, with socialization not being implemented even for lancong community aid in the form of scholarships. People's knowledge and understanding of education is still limited; lancong people prefer to work at a young age and refuse to attend school because they believe that education does not guarantee people's lives, however working as farmers or gold diggers does. As a result, it is possible to conclude that this strategy has not been implemented effectively and efficiently.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



\* Corresponding author.

E-mail addresses: [nellismardhiah@utu.ac.id](mailto:nellismardhiah@utu.ac.id)

## 1. Pendahuluan

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah sebuah gerakan nasional dalam hal pembangunan masyarakat yang tumbuh kemudian pengelolaannya dimulai dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Anggota dari PKK ini sendiri ialah ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Dalam program ini perempuan yang menjadi Publik figure dengan tujuan agar dapat memberikan pengaruh dan contoh yang baik untuk membantu mensejahterakan keluarganya. Menurut (Xie et al., 2021) kebijakan dibuat untuk melakukan sebuah peningkatan yang berkelanjutan agar terstruktur, mulai dari pembangunan dan pelatihan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dari kepala desa dalam membuat sebuah program untuk mensejahterakan masyarakat, program yang dibuat itu ialah Program PKK yang dijalankan oleh para wanita.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK berdasarkan pasal 5 Permendagri no 1 tahun 2013 gerakan Program PKK ini dilakukan dengan 10 program pokok, yaitu: 1. Penghayatan dan Pengamatan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, dan 10. Perencanaan sehat. Berdasarkan 10 item tersebut semua dijalankan dan dilaksanakan di setiap Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Akan tetapi untuk Desa Lancong Dari 10 program tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh hanya satu persatu yang dijalankan. Salah satu program yang dijalankan di Desa Lancong yaitu gotong royong yang dilakukan oleh pemuda pemudi dalam hal membersihkan jalan, got dan sebagai yang dilaksanakan setiap sebulan sekali. Kemudian pendidikan dan keterampilan yang dilaksanakan yaitu berupa sosialisasi ke anak usia dini hingga usia 9-12 tahun. Program kesehatan dilakukan seperti posyandu yang dilakukan sebulan sekali di Desa Lancong dalam meningkatkan mutu anak-anak.

Pemberdayaan masyarakat untuk saat ini menjadi fokus perhatian dalam melakukan pembangunan nasional di Indonesia dari waktu ke waktu, pemberdayaan masyarakat ini dilakukan pembangunan untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat sendiri. Kegiatan pemberdayaan ini bisa dilakukan jika masyarakat juga berpartisipasi dalam pembangunan sosial yang dilakukan. Menurut (Citra, 2017) pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan akan didorong melalui ilmu ekonomi dengan sistem terbuka yang konvensional dalam pandangan manusia ataupun lingkungan yang menjadi variabel luar. Hal ini sejalan dengan (Sunaryo, 2020) bahwa peningkatan kualitas SDM yang merupakan salah satu sasaran dalam objek pembangunan. Sehingga dengan hal ini diperlukan usaha untuk mewujudkan pembangunan diberbagai bidang yang saling berkesinambungan. Menurut (Muzaqi et al., 2020) salah satu bidang pembangunan yaitu kesejahteraan sosial agar upaya yang direncanakan terarah dari berbagai macam intervensi sosial untuk terpenuhinya kebutuhan hidup, masalah sosial yang bisa untuk diatasi dan semakin kuatnya institusi sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk perakaran dalam pembangunan kerakyatan dengan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang terjerat kemiskinan serta ketertinggalan dalam penelitian (Nurhanifa & Tjoetra, 2019) menurut pandangan Suharto. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi saja tetapi juga harkat dan martabat, harga diri dan sikap kepercayaan terhadap diri sendiri, etika dan moral yang terpelihara dengan baik dalam nilai sosial dan budaya setempat. Sehingga dalam hal ini masyarakat perlu untuk bekerja keras demi ketahanan kehidupannya.

Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu upaya untuk membangun sumber daya masyarakat sebagai cara untuk mendorong, memberi motivasi, serta memberikan kesadaran terhadap potensi ekonomi yang ada dan mampu memanfaatkan upaya dalam pengembangannya (Destri Rahmawati, 2019). Dengan melihat urgensi pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan prioritas utama pemberdayaan ini adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah kelakuan atau sikap pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan yang sempurna. Salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat setempat ialah dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan yang lebih baik. Menurut (Landriany, 2014) pendidikan lingkungan hidup adalah suatu faktor penting dalam keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi sarana penting menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip

pembangunan yang terus berlanjut. Sementara dalam pandangan (Mananeke et al., 2014) pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang berdasarkan proses dalam memperoleh sebuah keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan sebuah kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Dalam hal pendidikan ini tentu peran keluarga terutama orang tua sangat diperlukan, sehingga dalam hal ini kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan demi terciptanya pengetahuan serta pemahaman anak betapa pentingnya pendidikan. Menurut (Satria et al., 2021) kesejahteraan keluarga merupakan tolak ukur yang sangat berpengaruh dalam pembangunan. Angka kemiskinan masyarakat Indonesia dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Dalam penelitian (Retno, 2011) mengatakan bahwa tingkat kemiskinan juga berakibat dan berpengaruh dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Di Indonesia sendiri masih minim dan rendahnya tingkat pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat terkhusus untuk kaum wanita. Banyak yang beranggapan bahwa wanita tidak perlu untuk melakukan pendidikan tinggi karena akan kembali ke dapur, menjaga anak, mengurus rumah dan sebagainya. Padahal dalam hal pendidikan ini justru sangat menguntungkan bagi kaum wanita, disaat wanita berpendidikan wanita mempunyai kesempatan menciptakan generasi-generasi muda yang berkarakter baik dan penuh dengan wawasan, madrasah utama seorang anak adalah pada ibunya. Untuk itu sangat diperlukan partisipasi wanita untuk menjadi wanita yang mandiri dan berpendidikan tinggi. Sehingga perlu adanya kesejahteraan untuk wanita agar angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang. Dengan begitu pemberdayaan pendidikan sangat perlu untuk diterapkan dan diperhatikan oleh Pemerintah.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah suatu tempat untuk perempuan dalam mengembangkan kemampuan maupun potensi yang ada dalam dirinya secara mandiri demi mengatasi masalah yang ada dalam dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas hidupnya. Dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tujuan dari PKK adalah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera tanpa membeda-bedakan golongan, suku, ras, dan agama.

Keputusan pemerintah terkait program PKK ini sudah diakui dan diterapkan, keberhasilan PKK ini tidak dapat untuk dipungkiri karena sebagian pengurusnya adalah kaum wanita. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al'amin, 2017) dengan hasil penelitian program PKK lebih kuat dan tinggi nilai sosialnya pada bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan di desa simpang baru. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Wanti & Tripustikasari, 2019) dengan hasil kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan program PKK berdasarkan pelatihan kemampuan yang dilakukan pada bidang komputer dalam hal pendataan dan pencatatan agar tidak tertinggal jauh di Desa Patikraja. Penelitian yang dilakukan di Desa Kayuambon menyatakan bahwa Program PKK sudah berperan sangat aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus kaum wanita yang berkategori kurang mampu di Desa Kayuambon Lembang (Nurfadillah, 2019). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Wadu et al., 2018) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan perlu semangat dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk kesejahteraan dari program PKK. Berdasarkan observasi sementara sesuai keadaan dilapangan yang dilihat oleh peneliti banyak anak-anak yang kurang dalam membaca dan para remaja di Desa Lancong rata-rata tamatan SD sebanyak 36 orang, SMP sebanyak 7 orang, SMA sebanyak 8 orang masih sangat minim pengetahuan dan wawasan tentang pendidikan. Dari hasil observasi sementara peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Lancong yang merupakan Desa terpencil untuk melihat dan mengetahui kebijakan yang dijalankan di Desa tersebut terkait pendidikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu akan menjadi bahan dasar untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait lokasi dan fokus teori yang digunakan. Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut pandangan Edward III dengan judul penelitian Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Lancong. Hal ini dilakukan untuk melihat penerapan dan pelaksanaan kebijakan dalam membangun pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang minim akan pengetahuan. Berdasarkan data tingkat kemiskinan di Aceh pada Maret 2021

sejumlah 834,24. Dan untuk persentase angka kemiskinan di Aceh Barat sekitar 18,81% (databooks.co.id). Tentunya hal ini mempengaruhi tingkat pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Aceh terutama Aceh Barat terutama dalam hal pendidikan. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan dikarenakan masyarakat lebih cenderung memutuskan untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Terkait permasalahan yang terjadi Gampong Lancong adalah sebuah gampong terpencil yang terletak di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Secara geografi luas Wilayah Gampong Lancong 1.117.26 Ha. Sebelah utara berbatasan dengan Krung Wayla Gampong Tutut, sebelah selatan berbatasan dengan Alue Kuyun Wayla Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Sarah Perlak, dan Sebelah Timur Berbatasan dengan Pamue Aceh Tengah. Jumlah penduduk Gampong Lancong sebanyak 387 jiwa yang terbagi atas 2 dusun yaitu Dusun Nagoe sebanyak 193 jiwa dan Dusun Singgah mata sebanyak 194 jiwa. Untuk mengatasi permasalahan di gampong lancong mengenai kurangnya tingkat pendidikan di Desa Lancong membuat masyarakat lebih banyak memutuskan untuk bekerja daripada melanjutkan studinya, karena kesejahteraan masyarakat akan berkembang dengan baik jika pemahaman dan pengetahuan masyarakatnya lebih luas lagi dengan menuntut ilmu lebih baik lagi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan dan pelaksanaan Program PKK pada bidang pemberdayaan pendidikan bagi masyarakat Gampong Lancong sesuai dengan program PKK belum berjalan sesuai dengan ketentuan yg berlaku. Hal ini terlihat bahwa tidak adanya kreativitas apapun bagi kelompok PKK yang dikembangkan selama ini. Sehingga kondisi tersebut menjadi perhatian sesuai dengan ketentuan pemerintah untuk dapat dikembangkan melalui kreativitas masyarakat. Sehingga hal ini perlu untuk diteliti oleh penulis.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang merupakan rancangan dari penelitian yang dilakukan dibanyak bidang salah satunya di evaluasi, peneliti melihat lebih mendalam pada satu kasus berupa peristiwa dan proses antara satu individu atau lebih (Creswell, 2016). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data sekunder dan data primer, menggunakan teknik purposive sampling yakni pengambilan sampel secara terpilih dengan jumlah informan yang terpilih ada enam diantaranya informan 1 Kechik Gampong Lancong, informan ke II ketua program PKK, Informan ke III anggota PKK, Informan ke IV V dan VI adalah masyarakat setempat.

Lokasi penelitian yang dilakukan berada di Gampong Lancong, Sungai Mas, Kecamatan, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat bahwa pelatihan program PKK pada bidang pemberdayaan pendidikan belum terlihat, kreativitas masyarakat yang dilakukan di Gampong Lancong juga belum berjalan maksimal. Perempuan ataupun laki-laki banyak sekali mengambil keputusan untuk selesai SMA lanjut kerja dan menikah. Tidak ada dorongan maupun kreativitas bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri mulai dari kreatif dalam memanfaatkan masa muda kemudian menyelesaikan pendidikan tinggi. Belum ada yang mempengaruhi mereka untuk hidup mandiri diluar Gampong, mencari wawasan luas dan pengetahuan. Sehingga sangat awam sekali pengetahuan masyarakat. sehingga dalam hal ini peneliti perlu untuk mencari data dan fakta dari permasalahan yang terjadi di Gampong Lancong untuk di analisis berdasarkan data.

## 3. Hasil dan pembahasan

### Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan

Menurut Edward III implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika memenuhi empat indikator yaitu: Sumber Daya, Komunikasi, Sikap Pelaksana dan Struktur organisasi. Berikut penjabaran implementasi program PKK bidang pemberdayaan pendidikan berdasarkan pandangan dari Edward III;

## Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang sangat berpengaruh dalam implementasi dari kebijakan yang dibuat. Implementasi bisa berjalan secara efektif jika tujuan dan isi dari program itu bisa tersampaikan dengan jelas dan tepat pada sasaran. Hal ini bisa dilihat betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah kebijakan yang sudah dibuat agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sangat erat kaitannya dengan program pemberdayaan pendidikan pada program PKK di Gampong Lancong. Yang ingin penulis lihat pertama kali ialah faktor komunikasi diantara setiap stakeholders yang ikut serta atau terlibat dalam program pemberdayaan pendidikan program PKK di Gampong Lancong.

Berdasarkan pengamatan dan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi dalam implementasi program PKK bidang pemberdayaan pendidikan di Desa Lancong kurang baik. Jika diurutkan dari pernyataan ketua TIM PKK bidang pemberdayaan pendidikan yang menyatakan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi terkait kegiatan pelatihan menjahit pada tahun 2017 yang dilaksanakan selama 2 minggu. Program ini awalnya berjalan dengan baik akan tetapi seiring berjalannya waktu pelatihan berhenti karena masyarakat kurang berminat. Kemudian ditahun 2018 kreativitas masyarakat dimulai dengan pelatihan membuat kue oleh ibu-ibu PKK. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan sosialisasi pelatihan bibit dan mengadakan bibit rambutan untuk dilakukan penanaman di Gampong Lancong. Dan untuk tahun 2020 sampai 2021 tidak dilakukan program pemberdayaan pendidikan karena dana desa disalurkan ke bantuan selama covid 19. Hal yang bisa dilakukan pada saat covid yaitu melakukan sosialisasi pertemuan seperti pengambilan raport anak-anak di sekolah dasar, pada saat orang tua atau wali murid yang mengambil raport anak-anak sedikit dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan untuk anak-anak generasi muda dan fokus sosialisasi ini lebih ke anak-anak usia dini. Jika menelaah informasi dari pernyataan masyarakat Desa yang menjadi narasumber menyatakan bahwa sosialisasi terkait program PKK pemberdayaan pendidikan ini ada dilakukan seperti menjahit akan tetapi tidak diteruskan sampai sekarang bahkan masyarakat juga tidak mengetahui dimana mesin jahit itu sekarang. Untuk itu komunikasi pada implementasi program PKK pemberdayaan pendidikan dikatakan belum berjalan secara efektif.

Komunikasi yang terjalin antara pihak Desa, Ketua PKK dan masyarakat belum berjalan dengan baik. Sosialisasi terkait pendidikan juga belum dilakukan bersama masyarakat hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat lebih aktif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berbondong-bondong untuk meneruskan usaha turun temurun tersebut. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke masyarakat setempat bahwa masyarakat Lancong menjadi seorang petani karena orang tua sebelumnya juga petani dan sebagai penggali emas karena orang tua sebelumnya juga mengajak anak-anaknya untuk ikut melakukannya. Karena Desa ini merupakan Desa yang terpencil sehingga informasi yang didapatkan juga seadanya dan tingkat kreativitas pun masih sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kusrina, 2017) terkait komunikasi yang disampaikan pada kebijakan ini pemberdayaan program PKK ialah dengan melakukan sosialisasi pelatihan dan pemberian modal usaha kepada masyarakat Kecamatan Tegal Barat. Sementara dalam penelitian ini komunikasi berupa pelatihan yang dilakukan baru sekali yaitu pada tahun 2019 sehingga hal yang dilakukan ini belum optimal.

### 1) Sumber Daya

Implementasi yang dikemukakan Edward III bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini Edward III mengatakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pada pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan dapat dilihat dari jumlahnya juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, aturan, perintah dari atasan (pemimpin). Sumber daya dalam penerapan ini terbagi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

2) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia harus ada ketetapan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Gampong Lancong di pimpin oleh beberapa aparatur Gampong yakni Keuchik bernama Antom Sabar, Sekdes bernama Mustadi, Kaur Pemerintahan bernama Muhtadin, Kaur Pembangunan bernama Antom Sabar, Kaur Kestra bernama Abdul Latif, Bendahara bernama Mak Yunan, Kadus 1 bernama Hamdi, Kadus 2 bernama Hamidi masing-masing mempunyai tugas dan fungsi penting di Gampong Lancong.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala Kechik di Gampong Lancong bahwa sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat juga belum dilakukan karena minimnya informasi. Rata-rata masyarakat di Desa Lancong menempuh pendidikan terakhir SMA. Bahkan pengetahuan masyarakat terkait literasi atau sumber bacaan masih sangat minim. Pemuda masyarakat di Desa tersebut setelah selesai SMA langsung bekerja baik sebagai petani maupun sebagai penggali emas di sungai dan di gunung, untuk pemudi setelah selesai SMA kebanyakan memutuskan untuk menikah atau sebagai ibu rumah tangga. Skala kehidupan di Desa itu terus berputar seperti itu belum ada kemajuan, bahkan tingkat kreativitas pun masih sangat rendah. Sehingga dengan begitu sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk lebih memperdulikan atau melihat kondisi di Desa-desa terpencil. Perhatikan Tabel 1.

**Tabel 1.** Jenis mata pencarian penduduk menurut bidang usaha masyarakat Gampong Lancong

Bidang Usaha	Jumlah
Pertambangan	5
Industri Pengolahan	3
listrik, gas dan air	0
Bangunan dan Kontruksi	5
Pedagang	6
Angkutan dan komunikasi	0
PNS	0
ABR/Polisi	0
Pensiunan	0
Buruh	22
Pertanian	134
Galian C	0
Jumlah	175

Sumber: Data Sekunder Peneliti

Pendapatan atau sumber penghasilan masyarakat di Desa Lancong kebanyakan bermata pencarian sebagai petani dan rata-rata tidak ditemukan sebagai PNS ataupun guru. Sehingga sangat minim pengetahuan masyarakat tentang pendidikan dan para remaja juga rata-rata tidak ada yang berinisiatif sendiri untuk mencari pendidikan lebih tinggi ke luar daerah, karena faktor lingkungan dan ekonomi membuat mereka setelah selesai sekolah SMA maka berhenti ada yang menikah dan bekerja mencari emas di hutan dan di sungai. Sehinga dengan adanya program PKK pemberdayaan pendidikan bisa membantu membuat dan melatih kreativitas masyarakat yang dilakukan kepada kaum wanita. Karena peran wanita sangat mempengaruhi perkembangan keluarganya. Perhatikan Gambar 1.



**Gambar 1.** Mata pencarian masyarakat Lancong  
 Sumber: Data primer peneliti, 2021

Pada gambar 1 dapat dilihat mata pencarian masyarakat lancong yaitu menggali emas di tengah hutan menggunakan alat penggali seperti beko setelah itu dicuci disungai oleh masyarakat. Perjalanan ke hutan dan menaiki pegunungan itu cukup memakan waktu yang lama karena sangat jauh dari perumahan masyarakat. Masyarakat pergi berkelompok bahkan memakan waktu 1 bulan baru mereka pulang dan hal ini juga tergantung cuaca, jika hujan maka masyarakat tidak bisa ke lokasi penggalian emas dan berhenti di tengah perjalanan sampai cuaca bagus. Perjalanan menuju ke hutan tempat tambang emas itu bisa mencapai lima atau tujuh hari. Sehingga masyarakat lancong sangat dominan dan bekerja keras dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

3) Sumber daya finansial

Sumberdaya finansial sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan sebab tanpa dukungan finansial yang memadai, kebijakan atau program tidak bisa berjalan efektif. Perhatikan Tabel 2.

**Tabel 2.** Sumber daya anggaran Gampong Lancong untuk program PKK Tahun 2017-2020

Tahun	Jenis Kreativitas	Anggaran
2017	Menjahit	Rp20.000.000,00
2018	Membuat Kue	Rp15.000.000,00
2019	Bibit Rambutan	Rp20.000.000,00
2020	Alat-alat PKK	Rp9.500.000,00
	<b>Total</b>	<b>Rp64.500.000,00</b>

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti

Sumber daya anggaran Gampong Lancong ditahun 2017 yang di alokasikan untuk program PKK sebesar Rp20.000.000,00 untuk kegiatan kreativitas pelatihan menjahit sekaligus digunakan untuk membeli alat-alat untuk kebutuhan menjahit seperti mesin jagung 3 dan mesin jahit pinggir sebanyak 1. Pelatihan bersama narasumber dilakukan selama 2 minggu rutin dan penerapan selanjutnya para ibu-ibu PKK latihan bersama. Alat-alat untuk menjahit jika ada yang memerlukan bisa dipakai. Dan selanjutnya di tahun 2018 anggaran diberikan desa dalam jenis kretivitas program PKK yang berbeda yaitu pelatihan membuat kue sebesar Rp15.000.000,00. Pelatihan juga dilakukan oleh ibu-ibu PKK agar bisa memanfaatkan pengetahuan dengan baik. Seiring berjalannya waktu pelatihan ini juga terhambat karena masyarakat lebih condong kegiatan sehari-hari yang dilakukan seperti bertani dan menggali emas. Sehingga di tahun 2019 anggaran yang diberikan untuk

keaktivitas program PKK berupa pelatihan bibit dan membeli bibit rambutan dengan nominal Rp20.000.000,00. Pada tahun 2020 anggaran untuk kreativitas pelatihan pemberdayaan pendidikan tidak diberikan lagi karena dana desa lebih di fokuskan untuk bantuan covid 19. Sehingga dalam hal ini anggaran yang diberikan hanya setengah dari tahun sebelumnya yaitu Rp9.500.000,00 untuk membeli alat-alat yang bisa digunakan untuk acara. Sementara untuk pelatihan-pelatihan tidak ada lagi dilakukan, dalam hal ini hanya dilakukan sekilas terutama tentang pendidikan untuk anak usia dini yang diberikan saat orang tua anak-anak mengambil raport.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Al'amin, 2017) mengenai sumber daya yang dilakukan dengan modal sosial yang tinggi yang diukur dengan baik dalam pelaksanaan program PKK bidang kesehatan dan pendidikan dalam membentuk jaringan sosial. Hal ini berjalan dengan terus menerus sehingga program PKK ini berjalan dengan baik dengan adanya jaringan yang menciptakan dan membangun kepercayaan masyarakat. Sementara penelitian ini sumber daya yang dilakukan sangat jauh berbeda berupa penanaman modal dan pelatihan yang dilakukan dan komitmen dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri sehingga pelaksanaannya tidak efektif.

Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan namun jika tidak diiringi dengan dukungan dari sumber daya yang memadai maka bisa dikatakan kebijakan atau program tidak akan bisa berjalan efektif. Oleh karena itu, indikator ini menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi program PKK bidang Pemberdayaan Pendidikan di Desa Lancong. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari berbagai narasumber yang dilakukan peneliti selama proses penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam implementasi program PKK pemberdayaan pendidikan di Desa Lancong sudah cukup baik. Hanya saja perlu partisipasi dari masyarakat untuk menyukseskan dan mengembangkan Gampong tersebut.

#### Sikap Pelaksana

Pelaksanaan program PKK bidang pemberdayaan pendidikan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan untuk pelatihan-pelatihan juga belum optimal terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam hal ini ketua bidang pemberdayaan pendidikan juga belum ditetapkan ditahun 2021. Masih saling tunjuk menunjuk, hal ini sesuai dari informasi yang peneliti dapatkan saat menanyakan siapa ketua PKK di tahun 2021 ini. Sehingga untuk menyikapi hal ini ketua PKK periode sebelumnya seharusnya lebih cepat tanggap dalam menentukan siapa penerus selanjutnya yang akan membimbing program ini agar tidak terjadi kesalahan seperti saat ini.

Pelaksanaan program PKK yang berpartisipasi di bidang pendidikan yang pertama tentunya Kepala Desa, aparat gampong dan ibu-ibu PKK dan tentunya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini sangat sulit diterapkan di Gampong Lancong karena para pemuda pemudi lebih cenderung untuk mencari uang yang lebih menjamin kehidupan karena mereka beranggapan pendidikan, kreativitas juga tidak menghasilkan uang. Dalam mengambil sebuah keputusan tentunya para pelaksana yang bersangkutan saling bermusyawarah dulu tidak bisa langsung melakukannya begitu saja, apalagi berkaitan dengan program pemberdayaan pendidikan. Gampong Lancong merupakan Gampong terpencil sehingga sangat sulit untuk mengubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri apalagi mempengaruhinya untuk melakukan pendidikan kreativitas. Kami sebagai pihak pelaksana hanya mampu melakukan sosialisasi dan akan berusaha memberikan bantuan berupa beasiswa jika masyarakat itu sendiri mau melakukan pendidikan ke luar daerah. Mungkin dengan adanya satu orang yang mau dan mempunyai pemikiran yang berbeda bisa jadi hal ini menjadi pendorong untuk pemuda-pemudi selanjutnya. Masalahnya sampai saat ini masyarakat Lancong tidak ada yang melanjutkan kreativitas yang sudah diberikan seperti pelatihan-pelatihan pada tahun sebelumnya apalagi study nya sampai ke jenjang strata 1 (S1). Mereka hanya stop di pendidikan terakhir yaitu SMA. Sehingga tenaga kerja sebagai PNS pun di Desa ini belum ada. Dan sosialisasi yang dilakukan hanya berfokus pada anak usia dini mulai dari 9-12 tahun.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pathony, 2019) pelaksana dalam kebijakan program PKK menjalankan semua aturan dan persyaratan yang ditetapkan. Respon dan kognisi implementator terhadap kebijakan yang dijalankan mendapatkan nilai yang baik di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Seputih Rahman. Sementara dalam penelitian ini para implementator juga mendapat nilai baik dari masyarakat hanya saja masyarakatnya yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan program PKK ini.

#### Struktur Birokrasi

Aparatur gampong berdasarkan tugas dan fungsi di Gampong Lancong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat diantaranya dipimpin oleh; Keuchik bernama Antom Sabar yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong, membina masyarakat, menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat penyelenggaraan dan sebagainya. Sekretaris Desa bernama Mustadi bertugas dalam ketatausahaan administrasi, pelaksanaan urusan umum, keuangan dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Kaur pemerintah dipimpin oleh Muhtadin yang bertugas sebagai pembinaan masalah pertanahan dan batas Gampong, mengendalikan dan mengevaluasi ketentraman dan ketertiban, pemantau kegiatan sosial politik, dan sebagainya. Kaur Pembangunan yang dipimpin oleh Antom Sabar bertugas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pembangunan bidang ekonomi, SDA, pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya. Kaur Kestra yang dipimpin oleh Abdul Latif bertugas dalam pelaksanaan ketatausahaan dalam hal surat menyurat, penataan administrasi perangkat Gampong, penyiapan rapat dan sebagainya yang terlibat dalam urusan umum dan perencanaan. Bendahara yang dipimpin oleh Mak Yunan bertugas dalam pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan administrasi keuangan, penghasilan Keuchik, dan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Kadus 1 dipimpin oleh Hasbi dan Kadus 2 dipimpin oleh Hamidi yang bertugas pembantu pelaksanaan Kechik di wilayah Dusun, pelaksanaan pembinaan masyarakat, dan sebagainya yang diperintahkan oleh Keuchik.

Struktur pengurus TP-PKK Gampong Lancong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat yang dipimpin oleh Ketua bernama Ny. Umi Kasom, wakil ketua Ny Nyakmah, Sekretaris Ny Rahmawati, wakil Sekretaris Ny Maisuri, Bendahara Ny. Salmah, wakil bendahara Ny. Ria Amelia dan anggota-anggota lain baik ketua bidang disetiap Pokja I,II,III dan IV. Dan struktur organisasi ini periode 2019 dan untuk 2021 struktur organisasi belum dibuat. Kurang lebih penyusunannya sama dengan struktur lama.

Program PKK ini bertujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan serta keadilan gender, kesadaran hukum dan lingkungan, menjadi relevan untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga. Kesejahteraan keluarga disini ialah keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera lahir dan batin (Alámin, 2017; Muzaqi et al., 2020). PKK bertujuan untuk lebih menumbuhkan, mengarahkan, menghimpun dan membina keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Pemberdayaan perempuan dengan mengoptimalkan peran PKK juga diharapkan mampu memberikan penguatan perempuan dalam bidang ekonomi sehingga perempuan memiliki usaha alternatif yang akan melepaskannya dari tekanan ekonomi di tengah kesulitan-kesulitan krisis yang membelitnya. Sejalan dengan temuan tersebut, Sunaryo (2020) mencatat bahwa untuk berbagai kesulitan yang dihadapi, banyak perempuan-perempuan lebih memilih segera menikah dalam usia muda.

#### 4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Lancong berdasarkan 4 indikator yaitu sumber daya, komunikasi, sikap pelaksana dan struktur birokrasi belum berjalan secara efektif dan efisien. Dimana program pemberdayaan pendidikan ini belum berjalan dengan baik, sosialisasi yang dilakukan juga masih sangat kurang, penyampaian informasi juga masih kurang dan para pelaksana kebijakan juga belum maksimal. Sehingga dalam hal ini juga menjadi sorotan penting

untuk pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat terpencil. Dalam hal sumber daya masyarakat setempat hanya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada. Berdasarkan hasil wawancara bahwa benar adanya Desa terpencil ini sangat minim pengetahuan tentang dunia literasi dan pendidikan masih jauh tertinggal. Pernyataan-pernyataan yang peneliti dapatkan dibuktikan dengan dokumentasi baik data sekunder maupun data primer yang peneliti dapatkan. Tingkat keberhasilan PKK dalam pemberdayaan pendidikan rumah tangga adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan rumah tangga mandiri dengan mengembangkan serta memajukan kreativitas dan pendidikan yang merupakan faktor nomor satu untuk lebih ditingkatkan lagi sementara pendapatan ekonomi rumah tangga Gampong Lancong masyarakat lebih memilih berbondong-bondong bekerja yang sudah jelas menjamin kehidupan mereka sementara pendidikan belum tentu bisa menjamin kehidupan mereka. Sehingga dengan mindset tersebut perlunya program PKK bidang pemberdayaan pendidikan ini untuk lebih ditingkatkan lagi agar diterima di masyarakat tersebut. Pelatihan-pelatihan kreativitas yang dilakukan dengan fokus dan serius untuk mempengaruhi minat masyarakat. Saran yang dapat diberikan untuk program PKK bidang pemberdayaan pendidikan di Gampong Lancong yaitu: (1) Program PKK ini perlu untuk benar-benar dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, (2) Program PKK Bidang Pemberdayaan Pendidikan perlu untuk ditingkatkan lagi terkhusus dalam melakukan sosialisasi baik tentang kreativitas maupun pendidikan kepada masyarakat, (3) perlu diterapkannya pelatihan-pelatihan kepada anggota dan masyarakat tentang dunia literasi agar masyarakat Gampong Lancong tidak semakin tertinggal. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan kembali untuk melihat penerapan program PKK di Gampong Lancong karena penelitian yang dilakukan peneliti saat ini dalam keadaan covid 19 sehingga tidak melihat secara langsung pelatihan-pelatihan yang dilakukan bahkan informasi masih sangat kurang terkait sumber daya finansial.

#### Daftar Rujukan

- Al'amin, A. (2017). Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). *JOM FISIP*, 4(2), 1-15.
- Citra, I. P. A. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Destri Rahmawati. (2019). Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. *Mau'idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 79-91. <https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.34>
- Kusrina, T. (2017). Pemberdayaan Perempuan Meningkatkan Keterampilan Kegiatan PKK di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. *Pendidikan*, 2, 55-65.
- Landriany, E. (2014). Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 2, 82-88.
- Mananeke, L., Mandey, S., & Mufidah, M. (2014). Analisis Tingkat Pendidikan, Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Asuransi Jasaraharja Putera Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1339-1348. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.4726>
- Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. (2020). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Inklusif. *Journal Publicuho*, 3(3), 381. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.14010>
- Nurfadillah, S. U. (2019). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program UP2K-PKK Di Desa Kayuambon Lembang. *Jurnal Comm-Edu*, 2(1), 90-100.
- Nurhanifa, D., & Tjoetra, A. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Desa: Sebuah Kebijakan Pemerintah Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, 5(2).
- Pathony, T. (2019). *Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan*

- Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. 1(2), 262–289.*
- Retno, E. K. (2011). Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi, 2004*, 1–20.
- Satria, A. L. M., Fikri, Z., & Amar, H. (2021). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) di Desa Air Ruai. *Prosiding Seminar Nasional Perbatasan Dan Desa, April*, 58–70.
- Sunaryo, A. (2020). Implementasi Pemberdayaan Pendidikan Melalui 10 Program Pokok PKK. *Journal Public Service and Governance, 1(2)*, 253–278.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Dadi, M. Y. (2018). Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. *JIP, 8(1)*, 62–71.
- Wanti, L. P., & Tripustikasari, E. (2019). Pelatihan Komputer Dasar Bagi Kader PKK dan Posyandu Di Desa Patikraja. *Indonesian Journal Of Civil Society, 1(1)*, 17–23.
- Xie, H., Wen, J., & Choi, Y. (2021). How the SDGs are implemented in China—A comparative study based on the perspective of policy instruments. *Journal of Cleaner Production, 291*, 125937. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125937>